

## PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL BESERTA DETERMINANNYA

**Dian Imanina Burhany**

*dian.imanina@polban.ac.id*

**Neneng Dahtiah**

**Ahmad Syarief**

**Politeknik Negeri Bandung**

### ABSTRACT

*Corporate social and environmental responsibility (CSER) disclosure in Indonesia is currently not optimal, including in banking sector, both sharia banks and conventional banks. Many things are determinants, including company characteristics and elements of corporate governance. This study aims to determine difference in CSER disclosure between sharia banks and conventional banks and their determinants. Determinants consist of company characteristics which include company size and profitability as well as corporate governance elements which include board of director size, independent director, and audit committee. Research sample is sharia banks and conventional banks that carry out CSER disclosure on website in 2018. Research data is secondary data accessed through the bank's website. Data is analyzed using content analysis, descriptive analysis, and multiple regression analysis. Study result found that statistically, there is no difference in CSER disclosure between sharia banks and conventional banks, but descriptively, disclosure in sharia banks is higher than conventional banks. Furthermore, determinant that influence positively is company characteristic in the form of company size (assets), while company characteristic in the form of profitability and corporate governance elements in the form of board of directors size, independent director, and audit committee have no effect on CSER disclosure.*

*Key words: company characteristic; corporate governance element; social and environmental responsibility disclosure; sharia bank; conventional bank.*

### ABSTRAK

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di Indonesia saat ini belum maksimal, termasuk pada sektor perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Banyak hal yang menjadi determinan, di antaranya karakteristik perusahaan dan elemen tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konvensional beserta determinannya. Determinan terdiri atas karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan dan profitabilitas serta elemen tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit. Sampel penelitian adalah bank syariah dan bank konvensional yang melakukan pengungkapan TJSL di *website* pada tahun 2018. Data penelitian adalah data sekunder yang diakses melalui *website* bank. Data dianalisis menggunakan analisis konten, analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara statistik, tidak ada perbedaan pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konvensional, namun secara deskriptif, pengungkapan TJSL pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan pada bank konvensional. Selanjutnya, determinan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL adalah karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan (aset), sedangkan karakteristik perusahaan berupa profitabilitas serta elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Kata kunci: karakteristik perusahaan; elemen tata kelola perusahaan; pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; bank syariah; bank konvensional.

## PENDAHULUAN

Paradigma perusahaan telah bergeser dari hanya sekedar memaksimalkan laba yang merupakan aspek ekonomi, menjadi ikut peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ini yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial meliputi banyak hal seperti tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat sekitar, lingkungan, dan berbagai pihak lainnya. Secara umum cakupannya adalah aspek sosial dan lingkungan sehingga sering juga disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal ini pada awalnya dipicu oleh tekanan masyarakat yang mulai merasakan dampak negatif dari keberadaan perusahaan. Bisnis dan perusahaan memang menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap lingkungan (Alimullah, 2006). Tekanan juga berasal dari *stakeholder* lain seperti pemerintah, pelanggan, organisasi non pemerintah, bahkan karyawan perusahaan sendiri. Tekanan tersebut berbeda satu sama lain tergantung pada kepentingannya masing-masing, namun intinya mereka menginginkan perusahaan yang lebih peduli sehingga dapat mengurangi risiko mereka (Islam dan Deegan, 2008).

Karena adanya tekanan tersebut, perusahaan mulai melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana untuk berbagai aktivitas seperti pemberian layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, pelestarian lingkungan, perbaikan fasilitas umum, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan cenderung ingin memuaskan *stakeholder* karena membutuhkan dukungan untuk melanjutkan operasinya, sebagaimana dijelaskan oleh *stakeholder theory* (Jensen dan Meckling, 1976; Donaldson, 1999).

TJSL harus diungkapkan agar *stakeholder* mengetahuinya. Ini memperluas tanggung jawab manajemen dalam bidang akuntansi. Informasi akuntansi yang biasanya hanya terbatas pada laporan keuangan saja perlu dilengkapi lagi dengan informasi tambahan berupa pengungkapan TJSL. Pengungkapan TJSL adalah penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya (Guthrie *et al.*, 2008). Pengungkapan TJSL merupakan isu yang penting dalam dunia bisnis saat ini (Waller dan Lanis, 2009). Melalui pengungkapan TJSL, perusahaan dapat mengomunikasikan kepada *stakeholder* apakah mereka telah berperilaku sosial dan sejauh mana mereka menghormati masyarakat dan lingkungan (Habbash, 2016). Pengungkapan TJSL memainkan peran yang signifikan dalam bisnis karena dapat meningkatkan citra perusahaan dan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi (Friedman dan Miles, 2001; Deegan dan Blomquist, 2006). Perusahaan juga mengungkapkan informasi TJSL untuk mendapatkan respek dari publik atau untuk melegitimasi operasi bisnisnya (Deegan, 2002) sebagaimana dijelaskan oleh *legitimacy theory*. Menurut teori ini, perusahaan melakukan suatu aktivitas untuk mengesahkan aktivitasnya tersebut agar sejalan dengan keinginan masyarakat (Brammer dan Pavelin, 2006).

Saat ini tingkat pengungkapan TJSL perusahaan masih belum maksimal. Azim *et al.* (2011) melaporkan hanya 16% perusahaan publik di Bangladesh yang melakukan pengungkapan TJSL. Informasi lain, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya 33% (Retno dan Priantinah, 2012) dan tingkat pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan umum hanya 49,70% (Burhany, 2011). Sementara itu, sektor perbankan di Bangladesh hanya melaporkan 47,39% informasi TJSL pada laporan tahunannya (Ullah dan Rahman,

2015).

Masih rendahnya pengungkapan TJSJL pada umumnya disebabkan oleh belum kuatnya regulasi sehingga sifatnya masih *voluntary* atau *semi voluntary* (Buhr dan Freedman, 2001; Burhany, 2011). Namun regulasi merupakan variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Maka beberapa peneliti menguji hubungan pengungkapan TJSJL dengan beberapa variabel internal yang meliputi karakteristik perusahaan dan elemen tata kelola perusahaan. Karakteristik perusahaan yang ditemukan berhubungan atau berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL di antaranya adalah ukuran perusahaan (Hackston dan Milne, 1996; Tagesson *et al.*, 2009; Giannarakis, 2014; Habbash, 2016) dan profitabilitas (Giannarakis, 2014). Namun Habbash (2016) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL. Sementara itu, elemen tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL adalah ukuran dewan direksi (Esa dan Ghazali, 2012; Lone dan Khan, 2016), direksi independen (Khan, 2010; Lone dan Khan, 2016), dan komite audit (Said *et al.*, 2009). Namun masih terdapat hasil yang berbeda yaitu ukuran dewan direksi (Giannarakis, 2014), direksi independen (Habbash, 2016), dan komite audit (Habbash, 2016) ditemukan tidak berhubungan dengan pengungkapan TJSJL.

Sektor perbankan mulai menjadi perhatian karena dengan keuntungan dan dana yang dimiliki sebenarnya dapat memberikan kontribusi sosial dan lingkungan yang besar. Saat ini sektor perbankan semakin terlibat dalam inisiatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan dengan memperkenalkan praktik yang disebut *green banking* (Shaumya dan Arulrajah, 2017). Meskipun tidak secara langsung, sektor perbankan memiliki andil dalam aspek lingkungan. Penggunaan energi (listrik dan air) dan kertas (yang berasal dari pepohonan), cukup tinggi pada sektor ini. Demikian juga dengan

kepedulian yang ditunjukkan dalam bentuk *charity* kepada masyarakat membuktikan bahwa sektor ini memiliki andil yang besar dalam TJSJL.

Regulasi yang berkaitan dengan TJSJL untuk bank dan lembaga keuangan lain telah ada saat ini. Pada tanggal 27 Juli 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSJL adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa: “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.” Pada Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa: “LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSJL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSJL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.”

Pada POJK ini, pengungkapan TJSJL diatur dalam Pasal 10. Pada ayat (1) ditetapkan bahwa: “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.” Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa: “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Publikasi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui situs *web* LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.”

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa perhatian sektor perbankan mengenai keberlanjutan agak lambat. Kolk *et al.*

(2001) menemukan bahwa sektor keuangan dan jasa umum mengurangi informasi lingkungan karena menganggap dampak mereka terhadap lingkungan tidak seperti pada sektor manufaktur. Meskipun demikian, sektor perbankan sudah mulai memasukkan aspek lingkungan ini (Viganò dan Nicolai, 2009 dalam Vilar dan Simão, 2015). Pengungkapan TJSJL pada sektor ini juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Scholtens, 2009). Peningkatan pengungkapan tersebut dipicu oleh peningkatan pengeluaran bank untuk aktivitas TJSJL (Ullah dan Rahman, 2015).

Selain bank konvensional, saat ini sektor perbankan diramaikan oleh bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah dalam agama Islam yaitu tidak mengandung bunga atau riba. Bank syariah menjadi alternatif yang cukup diminati dalam era modern saat ini dan menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir (Farook *et al.*, 2011). Sebagai negara berkembang dengan populasi muslim yang besar, Indonesia merupakan pasar yang prospektif untuk industri berbasis syariah termasuk bank syariah. Saat ini ada 13 bank syariah dan puluhan unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan pada nilai-nilai Islami tentang keadilan sosial dan akuntabilitas, bank syariah memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan dan mengungkapkan TJSJL (Farook *et al.*, 2011; Ilyas, 2018). Penelitian juga menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pengungkapan TJSJL antara bank Islam atau syariah dan bank konvensional (Aribi dan Gao, 2010), cukup tingginya tingkat pengungkapan aktivitas TJSJL perusahaan berbasis syariah pada laporan tahunan (Yahya *et al.*, 2004; Haniffa dan Hudaib, 2007), dan pengungkapan TJSJL oleh bank Islam atau syariah umumnya tumbuh dengan baik di Malaysia dan Indonesia (Amran *et al.*, 2017).

Maka, berdasarkan uraian yang menunjukkan masih relatif rendahnya tingkat pengungkapan TJSJL, adanya regulasi POJK

No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaksanakan dan mengungkapkan TJSJL, serta masih adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengungkapan TJSJL antara bank syariah dan bank konvensional beserta determinannya. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah pada pengambilan periode pengungkapan TJSJL untuk tahun 2018, yaitu setelah terbitnya POJK No. 51/POJK.03/2017. Dengan demikian dapat dilihat nantinya, apakah dengan adanya regulasi tersebut, determinan yang terdiri atas karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan dan profitabilitas serta elemen tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit, berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Stakeholder Theory*

*Stakeholder theory* digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kelompok kepada siapa perusahaan harus bertanggung jawab. Dalil utama teori ini adalah bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada keberhasilan manajemen dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder*-nya (Elijido-Ten, 2007). Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute untuk menjelaskan “suatu kelompok yang tanpa dukungannya, organisasi akan berhenti” (Freeman, 1984 dalam Elijido-Ten, 2007). Dengan sudut pandang ini maka anggapan bahwa keberhasilan perusahaan hanya bergantung pada maksimalisasi kesejahteraan pemegang saham (*shareholder*) menjadi tidak relevan lagi, karena keberadaan suatu entitas perusahaan pada dasarnya merupakan kontrak antara perusahaan itu dan berbagai pihak lain yang disebut *stakeholder* (Jensen dan Meckling, 1976).

*Stakeholder theory* diturunkan dari *socio-political theory* yang menjelaskan bahwa

tindakan suatu perusahaan dilakukan atas tekanan sosial dan politik yang dihadapi. Untuk menghadapi tekanan itu maka perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi agar dapat mengubah persepsi *stakeholder* terhadapnya (Patten, 2002). *Stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik untuk kepentingan pengambilan keputusannya dan perusahaan harus menyediakan informasi itu. Informasi merupakan media utama yang dapat digunakan organisasi untuk mengelola (atau memanipulasi) *stakeholder* dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan penerimaan atau untuk mengalihkan penentangan dan penolakan (Gray *et al.*, 1995). Organisasi akan bertindak berdasarkan tuntutan *stakeholder*-nya. Jika *stakeholder* menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi TJSL maka organisasi atau perusahaan akan melakukannya (Vilar dan Simão, 2015).

### **Legitimacy Theory**

Sebagaimana halnya *stakeholder theory*, *legitimacy theory* juga diturunkan dari *socio-political theory* dan digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu perusahaan melakukan suatu tindakan tertentu (Farache dan Perks, 2010; Gamerschlag *et al.*, 2011). Inti dari teori ini adalah bahwa perusahaan memiliki keinginan untuk tampil sebagai perusahaan yang baik yang menggunakan sebagian dari sumber dayanya untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan bukan hanya kepada para pemegang sahamnya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak dikenakan biaya politik jika tindakannya tidak disukai oleh masyarakat (Deegan dan Rankin, 1996; Hooghiemstra, 2000). Dengan melakukan pengungkapan TJSL, perusahaan mencoba membentuk citra positif dan menunjukkan identitas bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan ditekan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip sosial dan masyarakat bertindak sebagai pihak yang mengamati tindakan tersebut. Adanya kontrak sosial semacam itu merupakan salah satu cara perusahaan

untuk melegitimasi operasinya. Sebagai hasil dari tekanan tersebut, perusahaan melaporkan jumlah informasi yang lebih banyak mengenai TJSL ketika mereka menghadapi sorotan publik dan cenderung mengungkapkan fakta positif dengan nada memuji untuk melegitimasi perilaku mereka (Deegan dan Gordon, 1996).

Pengomunikasian aktivitas TJSL menjadi saluran untuk menciptakan, memulihkan, atau mempertahankan legitimasi perusahaan. Jadi, jika *stakeholder theory* lebih fokus pada dampak kelompok atau individu terhadap perilaku organisasi, maka *legitimacy theory* mengintegrasikan visi bahwa masyarakat, kebijakan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan (aspek ekonomi, lingkungan dan sosial tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah). Membuat informasi sosial dan lingkungan tersedia secara sukarela merupakan respon terhadap keberadaan individu atau kelompok yang tertarik pada perilaku organisasi (Moneva dan Llena, 2000). Sebuah organisasi akan mengidentifikasi *stakeholder* yang paling signifikan dan secara positif mengondisikan persepsi tentang tindakannya, agar mendapatkan legitimasi untuk eksis dan beroperasi (Vilar dan Simão, 2015).

### **Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Secara Umum dan Menurut Syariah**

Isi atau konten pengungkapan TJSL sangat bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tergantung pada aktivitas TSJL yang dilakukannya. Perusahaan yang memiliki dampak lingkungan seperti perusahaan manufaktur dan pertambangan biasanya melakukan lebih banyak aktivitas TJSL pada aspek lingkungan, sehingga juga mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai aspek tersebut. Sedangkan perusahaan jasa lebih menekankan aktivitas dan pengungkapan TJSL pada aspek sosial. Hal lain yang menyebabkan bervariasinya konten pengungkapan TJSL adalah karena praktik ini merupakan konsep yang masih berkembang (Alam *et al.*, 2010).

GRI (Global Reporting Initiative) *Sustainability Reporting Guidelines* yang merupakan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan (sering juga disebut laporan CSR) yang identik dengan TJSJL, memberikan acuan pengungkapan yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, karyawan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk (GRI, 2015). Indikator pengungkapan TJSJL GRI terus direvisi dan saat ini sudah berada pada generasi keempat atau GRI 4.0. Selain laporan keberlanjutan, tempat pengungkapan TJSJL lainnya adalah laporan tahunan (Deegan dan Rankin, 1996; Guthrie *et al.*, 2008). Laporan tahunan dapat dipandang sebagai sarana di mana perusahaan menyampaikan citranya kepada publik melalui laporan yang bersifat sukarela (Guthrie dan Abeysekera, 2006). Pada era teknologi informasi saat ini, sebagian besar perusahaan menyediakan laporan tersebut di *website*-nya.

Fondasi teoritis TJSJL yang walaupun berasal dari Barat, namun sangat mirip dengan doktrin syariah Islam tentang keadilan sosial dan akuntabilitas (Ilyas, 2018). Tujuan perusahaan beroperasi bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan tapi juga menjalankan *fardhu kifayah* untuk bekerja menuju tujuan mulia seperti memerangi kemiskinan dan mengangkat orang yang kurang beruntung dan tertindas (Yusuf dan Bahari, 2015). Tanggung jawab sosial dalam Islam harus didasarkan pada konsep Islami bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan (Aribi dan Gao, 2010). Cara terbaik menjalankan bisnis dalam Islam adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperhatikan relasi sosial (Rashid *et al.*, 2013). Islam juga mengatur bahwa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan (Aribi dan Gao, 2010).

Menerapkan nilai-nilai syariah sudah dengan sendirinya menerapkan indikator-indikator dalam TJSJL karena praktik TJSJL konsisten dengan prinsip dan nilai syariah atau nilai Islami yang ditetapkan dalam Al

Quran (Dusuki dan Abdullah, 2007). Al Quran mengatur agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi dan hidup secara harmonis dengan makhluk lainnya. Dalam Surat Al Qashash ayat (77) diserukan kepada manusia: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Nilai Islami mendukung perlunya bank syariah melakukan dan mengungkapkan TJSJL (Farook *et al.*, 2011). Aribi dan Gao (2010) menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam pengungkapan TJSJL antara bank Islam atau syariah dan bank konvensional. Yahya *et al.* (2004); Haniffa dan Hudaib (2007), menemukan tingkat pengungkapan aktivitas TJSJL perusahaan berbasis syariah pada laporan tahunan cukup tinggi. Amran *et al.* (2017) menemukan pengungkapan TJSJL oleh bank Islam atau syariah umumnya tumbuh dengan baik di Malaysia dan Indonesia, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Ada perbedaan pengungkapan TJSJL antara bank syariah dan bank konvensional.

### **Karakteristik Perusahaan sebagai Determinan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Karakteristik perusahaan yang terdiri atas beberapa elemen merupakan salah satu determinan pengungkapan TJSJL. Hackston dan Milne (1996); Tagesson *et al.* (2009) menemukan hubungan positif antara karakteristik berupa ukuran perusahaan dan jumlah informasi TJSJL yang diungkapkan. Giannarakis (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berhubungan positif dengan pengungkapan

TJSL. Sementara itu, Habbash (2016) menemukan ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh positif, sedangkan *firm leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSL. Penelitian lainnya oleh Kolk (2003) menemukan tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Perusahaan yang ukurannya lebih besar cenderung melakukan pengeluaran TJSL yang lebih besar pula kemudian mengungkapkannya. Ini disebabkan karena perusahaan yang berukuran besar memiliki aset yang besar pula untuk dialokasikan pada aktivitas TJSL (Cowen *et al.*, 1987). Umur perusahaan biasanya sudah tergambar pada ukuran perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih besar dengan sendirinya memiliki keleluasaan dana untuk disisihkan ke dalam aktivitas TJSL dan mengungkapkannya. *Financial leverage* terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana dari utang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan TJSL. Pada bank syariah tidak dikenal adanya bunga sehingga variabel ini tidak diteliti. Tipe industri dalam penelitian ini adalah homogen sehingga tidak diteliti, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

H<sub>3</sub> : Karakteristik perusahaan berupa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

#### **Elemen Tata Kelola Perusahaan sebagai Determinan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Tata kelola perusahaan menyangkut organ-organ yang terkait dalam pengelolaan perusahaan. Elemen tata kelola yang ditemukan berhubungan atau berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan TJSL adalah yang terkait dengan dewan direksi.

Esa dan Ghazali (2012); Giannarakis (2014), menemukan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan luas pengungkapan TJSL. Lone dan Khan (2016) menemukan bahwa ukuran dewan direksi, direktur independen, dan direktur wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Khan (2010) menemukan bahwa direktur non-eksekutif dan anggota direksi berkebangsaan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Ukuran dewan direksi yang lebih besar (jumlah direksi lebih banyak) diyakini merupakan kekuatan yang akan mendorong diungkapkannya TJSL. Direksi independen atau direktur non-eksekutif juga diyakini merupakan determinan pengungkapan TJSL karena berasal dari luar perusahaan sehingga dapat bersikap lebih tegas dibandingkan direksi yang berasal dari dalam perusahaan. Direktur wanita tidak relevan dalam penelitian ini karena sebagian besar bank masih didominasi oleh direktur pria. Direktur berkebangsaan asing hampir tidak ada karena bank yang diteliti adalah bank nasional.

Elemen tata kelola perusahaan lainnya yang berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL adalah komite audit. Said *et al.* (2009) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan TJSL. Hal ini disebabkan karena komite audit merupakan organ pengawas yang diharapkan dapat mendorong perusahaan melakukan *best practices* termasuk pengungkapan TJSL, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

H<sub>5</sub> : Elemen tata kelola perusahaan berupa direktur independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

H<sub>6</sub> : Elemen tata kelola perusahaan berupa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

**METODE PENELITIAN**

**Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yang mendeskripsikan variabel pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional kemudian membandingkannya. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh antar variabel.

**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel independen karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan dan

profitabilitas, tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit, serta variabel dependen pengungkapan TJSI. Operasionalisasi variabel independen dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Said *et al.* (2009); Giannarakis (2014); Ullah dan Rahman (2015); Habbash (2016), sedangkan variabel dependen merujuk pada indikator pengungkapan TJSI GRI 4.0 yang sejalan dengan indikator pengungkapan yang diatur pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator
Ukuran Perusahaan (X <sub>1</sub> )	Jumlah aset
Profitabilitas (X <sub>2</sub> )	<i>Return on assets</i> (ROA)
Ukuran dewan direksi (X <sub>3</sub> )	Jumlah direksi
Direksi independen (X <sub>4</sub> )	Jumlah direksi independen dibandingkan jumlah seluruh direksi
Komite audit (X <sub>5</sub> )	Jumlah anggota komite audit
Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Y)	Indeks pengungkapan berdasarkan GRI 4.0

**Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah bank umum yaitu bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Jumlah bank syariah di Indonesia adalah 13 bank sedangkan jumlah bank konvensional adalah 70 bank. Sampel diambil secara *purposive* yaitu bank syariah dan bank konvensional yang melakukan pengungkapan TJSI pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) tahun 2018 yang dipublikasikan pada *website*-nya. Bank syariah yang memenuhi kriteria ini adalah sebanyak 11 bank dan bank konvensional sebanyak 50 bank, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 61 bank.

**Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Semua data penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui *website* bank yang bersangkutan.

**Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis**

Analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*), analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Analisis konten dilakukan dengan mempelajari konten atau isi laporan keberlanjutan atau laporan tahunan bank untuk menentukan adanya indikator atau item pengungkapan TJSI, analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan profil variabel, dan analisis regresi berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-z untuk menguji perbedaan serta uji-t untuk menguji pengaruh. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari

analisis regresi berganda.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data variabel penelitian disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 61 bank, baik bank syariah maupun bank konvensional, ukuran perusahaan berdasarkan aset memiliki nilai minimum Rp903 miliar, nilai maksimum Rp1.124 triliun, nilai rata-rata Rp8,29 triliun, dan nilai standar deviasi Rp193,5 triliun. Karena nilai rata-rata lebih kecil daripada

nilai standar deviasi maka berarti data variabel ukuran perusahaan berdasarkan aset sangat bervariasi. Sementara itu, profitabilitas berdasarkan ROA memiliki nilai minimum -0,1077 atau -10,77% (rugi), nilai maksimum 0,0550 atau 5,50%, nilai rata-rata 0,007289 atau 0,7289%, dan nilai standar deviasi 0,0247941 atau 2,47941%. Karena nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel profitabilitas berdasarkan ROA sangat bervariasi.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Data Variabel Penelitian**

No.	Kode Variabel	Nama Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
1.	X <sub>1</sub>	Ukuran Perusahaan-Aset	61	903 miliar rupiah	1.124 triliun rupiah	8,29 triliun rupiah	193,5 triliun rupiah
2.	X <sub>2</sub>	Profitabilitas-ROA	61	-0,1077	0,0550	0,007289	0,0247941
3.	X <sub>3</sub>	Ukuran Dewan Direksi	61	3	12	5,93	2,387
4.	X <sub>4</sub>	Direksi Independen	61	0,0000	1,0000	0,058102	0,1466333
5.	X <sub>5</sub>	Komite Audit	61	2	7	3,82	1,148
6.	Y	Pengungkapan TJSJL	61	0,0516	0,5871	0,269907	0,1408662

Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

Data variabel dewan direksi memiliki nilai minimum 3 (yang berarti bank tersebut memiliki 3 orang direksi), nilai maksimum 12 (yang berarti bank tersebut memiliki 12 orang direksi), nilai rata-rata 5,93 dan nilai standar deviasi 2,387. Karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel dewan direksi relatif sama atau tidak terlalu bervariasi. Data variabel direksi independen memiliki nilai minimum 0,0000 (yang berarti bank tersebut tidak memiliki satu orangpun direksi independen), nilai maksimum 1,0000 atau 1 (yang berarti semua direksi pada bank tersebut adalah direksi independen yang berasal dari luar), nilai rata-rata 0,058102 dan nilai standar deviasi 0,1466333. Karena nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel direksi independen sangat bervariasi. Data variabel independen terakhir yaitu komite audit

memiliki nilai minimum 2 (yang berarti bank tersebut memiliki 2 orang komisioner di komite audit), nilai maksimum 7 (yang berarti bank tersebut memiliki 7 orang komisioner di komite audit), nilai rata-rata 3,82 dan nilai standar deviasi 1,148. Karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel komite audit relatif sama atau tidak terlalu bervariasi. Akhirnya, data variabel dependen pengungkapan TJSJL memiliki nilai minimum 0,0516 atau 5,16% (yang berarti bank tersebut mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 5,16%), nilai maksimum 0,5871 atau 58,71% (yang berarti bank tersebut mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 58,71%), nilai rata-rata 0,269907 atau 26,99% (yang berarti rata-rata bank mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak

26,99%) dan nilai standar deviasi 0,1408662 atau 14,09%. Karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel pengungkapan TJSL tidak terlalu bervariasi.

**Deskripsi Nilai Indeks Rata-rata Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Pada Tabel 3 berikut dideskripsikan nilai indeks rata-rata pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional. Nilai ini diperoleh dari hasil analisis konten dengan cara membandingkan pengungkapan yang dilakukan oleh bank dengan 155 standar atau indikator pengungkapan menurut GRI 4.0.

**Tabel 3**  
**Nilai Indeks Rata-rata Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Standar	Indikator	Nilai Rata-rata		
		BS	BK	
<b>PENGUNGKAPAN UMUM (GENERAL)</b>				
<b>PROFIL ORGANISASI (ORGANIZATIONAL PROFILE)</b>				
G1	Nama organisasi	1,00	1,00	
G2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1,00	0,86	
G3	Lokasi kantor pusat	1,00	0,68	
G4	Lokasi operasi	0,91	0,58	
G5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1,00	0,90	
G6	Pasar yang dilayani	1,00	0,64	
G7	Skala organisasi	0,36	0,60	
G8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1,00	0,52	
G9	Rantai pasokan	0,73	0,36	
G10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	0,82	0,66	
G11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1,00	0,70	
G12	Inisiatif eksternal	0,91	0,68	
G13	Keanggotaan asosiasi	0,55	0,46	
		Sub jumlah	<b>11,27</b>	8,64
<b>STRATEGI (STRATEGY)</b>				
G14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1,00	0,88	
G15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0,09	0,46	
		Sub jumlah	1,09	<b>1,34</b>
<b>ETIKA DAN INTEGRITAS (ETHICS AND INTEGRITY)</b>				
G16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	0,91	0,70	
G17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0,18	0,60	
		Sub jumlah	<b>0,09</b>	0,04
<b>TATA KELOLA (GOVERNANCE)</b>				
G18	Struktur tata kelola	1,00	0,78	
G19	Mendelegasikan wewenang	0,36	0,52	
G20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0,00	0,30	
G21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0,00	0,32	
G22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0,64	0,48	
G23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0,64	0,48	

G24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0,64	0,42
G25	Konflik kepentingan	0,36	0,38
G26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0,00	0,40
G27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0,00	0,20
G28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0,36	0,48
G29	Mengidentifikasi & mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0,00	0,18
G30	Keefektifan proses manajemen risiko	0,64	0,60
G31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0,00	0,30
G32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0,00	0,26
G33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0,00	0,30
G34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0,00	0,14
G35	Kebijakan remunerasi	0,64	0,46
G36	Proses untuk menentukan remunerasi	0,64	0,44
G37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0,09	0,16
G38	Rasio kompensasi total tahunan	0,64	0,24
G39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0,64	0,24
Sub jumlah		7,27	<b>8,12</b>
<b>KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ENGAGEMENT)</b>			
G40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	0,36	0,30
G41	Perjanjian perundingan kolektif	0,27	0,26
G42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	0,36	0,44
G43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	0,55	0,44
G44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	0,55	0,30
Sub jumlah		<b>2,09</b>	1,74
<b>PRAKTIK LAPORAN (REPORT PRACTICE)</b>			
G45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	0,55	0,62
G46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	0,36	0,38
G47	Daftar topik material	0,45	0,34
G48	Penyajian kembali informasi	0,36	0,26
G49	Perubahan dalam pelaporan	0,55	0,34
G50	Periode pelaporan	0,64	0,50
G51	Tanggal laporan terbaru	0,64	0,42
G52	Siklus pelaporan	0,64	0,46
G53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	0,73	0,44
G54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	0,36	0,26
G55	Indeks isi GRI	0,36	0,28
G56	<i>Assurance</i> /jaminan oleh pihak eksternal	0,36	0,36
Sub jumlah		<b>6,00</b>	4,62
Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Umum (A)		<b>28,82</b>	25,76
Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Umum (A : 56)		<b>0,51</b>	0,46

<b>PENGUNGKAPAN EKONOMI (ECONOMIC)</b>			
<b>KINERJA EKONOMI (ECONOMIC PERFORMANCE)</b>			
EC1	Pendekatan manajemen	0,36	0,52
EC2	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	0,45	0,40
EC3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0,73	0,32
Sub jumlah		<b>1,55</b>	<b>1,24</b>
<b>KEBERADAAN PASAR (MARKET PRESENCE)</b>			
EC4	Pendekatan manajemen	0,09	0,38
EC5	Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0,36	0,24
EC6	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0,09	0,22
Sub jumlah		0,55	<b>0,84</b>
<b>DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT ECONOMIC IMPACTS)</b>			
EC7	Pendekatan manajemen	0,36	0,36
EC8	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0,36	0,40
EC9	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0,18	0,22
Sub jumlah		0,91	<b>0,98</b>
<b>PRAKTIK PENGADAAN (PROCUREMENT PRACTICES)</b>			
EC10	Pendekatan manajemen	0,09	0,16
EC11	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	0,00	0,12
Sub jumlah		0,09	<b>0,28</b>
<b>ANTI KORUPSI (ANTI CORRUPTION)</b>			
EC12	Pendekatan manajemen	0,36	0,50
EC13	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0,27	0,44
EC14	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0,36	0,42
EC15	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0,36	0,28
Sub jumlah		1,36	1,64
<b>PERILAKU ANTI PERSAINGAN (ANTI COMPETITIVE BEHAVIOR)</b>			
EC16	Pendekatan manajemen	0,09	0,08
EC17	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik <i>anti-trust</i> dan monopoli	0,00	0,04
Sub jumlah		0,09	<b>0,12</b>
Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Ekonomi (B)		4,55	<b>5,10</b>
Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Ekonomi (B : 17)		0,27	<b>0,30</b>
<b>PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)</b>			
<b>MATERIAL</b>			
EN1	Pendekatan manajemen	0,27	0,12
EN2	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0,18	0,12
EN3	Material input dari daur ulang yang digunakan	0,00	0,02
EN4	Produk <i>reclaimed</i> (diolah kembali) dan material kemasannya	0,00	0,02
Sub jumlah		<b>0,45</b>	0,28

<b>ENERGI</b>			
EN5	Pendekatan manajemen	0,27	0,16
EN6	Konsumsi energi dalam organisasi	0,18	0,16
EN7	Konsumsi energi di luar organisasi	0,00	0,04
EN8	Intensitas energi	0,09	0,10
EN9	Pengurangan konsumsi energi	0,27	0,20
EN10	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0,00	0,22
Sub jumlah		0,82	<b>0,88</b>
<b>AIR (WATER)</b>			
EN11	Pendekatan manajemen	0,18	0,16
EN12	Pengambilan air berdasarkan sumber	0,09	0,10
EN13	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	0,00	0,02
EN14	Daur ulang dan penggunaan air kembali	0,00	0,08
Sub jumlah		0,27	<b>0,36</b>
<b>KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITY)</b>			
EN15	Pendekatan manajemen	0,18	0,02
EN16	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0,00	0,02
EN17	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0,09	0,02
Sub jumlah		<b>0,27</b>	0,06
<b>EMISI (EMISSION)</b>			
EN18	Pendekatan manajemen	0,18	0,02
EN19	Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	0,09	0,04
EN20	Pengurangan emisi GRK	0,09	0,06
Sub jumlah		<b>0,36</b>	0,12
<b>AIR LIMBAH DAN LIMBAH (EFFLUENTS AND WASTE)</b>			
EN21	Pendekatan manajemen	0,18	0,06
EN22	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan	0,00	0,06
EN23	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0,09	0,14
EN24	Tumpahan yang signifikan	0,09	0,04
Sub jumlah		<b>0,36</b>	0,30
<b>KEPATUHAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL COMPLIANCE)</b>			
EN25	Pendekatan manajemen	0,09	0,12
EN26	Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0,00	0,08
Sub jumlah		0,09	<b>0,20</b>
<b>PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK (SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT)</b>			
EN27	Pendekatan manajemen	0,09	0,02
EN28	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0,00	0,00
EN29	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0,00	0,02

	Sub jumlah	<b>0,09</b>	0,04
Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Lingkungan (C)		<b>2,73</b>	2,24
Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Lingkungan (C : 29)		<b>0,09</b>	0,08
<b>PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL)</b>			
<b>KEPEGAWAIAN (EMPLOYMENT)</b>			
SOC1	Pendekatan manajemen untuk kepegawaian	0,09	0,28
SOC2	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0,82	0,44
SOC3	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0,27	0,30
SOC4	Cuti melahirkan	0,18	0,20
	Sub jumlah	<b>1,36</b>	1,22
<b>HUBUNGAN TENAGA KERJA-MANAJEMEN (LABOR MANAGEMENT RELATION)</b>			
SOC5	Pendekatan manajemen untuk hubungan tenaga kerja	0,00	0,12
SOC6	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0,00	0,08
	Sub jumlah	0,00	<b>0,20</b>
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (OCCUPATIONAL-HEALTH-AND-SAFETY)</b>			
SOC7	Pendekatan manajemen untuk kesehatan dan keselamatan kerja	0,27	0,22
SOC8	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen pekerja untuk kesehatan dan keselamatan	0,45	0,30
SOC9	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan	0,18	0,26
SOC10	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka	0,36	0,28
SOC11	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh	0,45	0,24
	Sub jumlah	<b>1,73</b>	1,30
<b>PELATIHAN DAN PENDIDIKAN (TRAINING AND EDUCATION)</b>			
SOC12	Pendekatan manajemen untuk pelatihan dan pendidikan	0,27	0,34
SOC13	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1,00	0,44
SOC14	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1,00	0,46
SOC15	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0,73	0,36
	Sub jumlah	<b>3,00</b>	1,60
<b>KEANEKARAGAMAN DAN KESETARAAN KESEMPATAN (DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY)</b>			
SOC16	Pendekatan manajemen untuk keanekaragaman dan kesetaraan kesempatan	0,00	0,12
SOC17	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0,00	0,16
SOC18	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0,73	0,38
	Sub jumlah	<b>0,73</b>	0,66

<b>NON DISKRIMINASI (NON DISCRIMINATION)</b>			
SOC19	Pendekatan manajemen untuk non diskriminasi	0,00	0,06
SOC20	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0,09	0,08
Sub jumlah		0,09	<b>0,14</b>
<b>KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF (FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING)</b>			
SOC21	Pendekatan manajemen untuk kebebasan berserikat dan perundingan kolektif	0,18	0,02
SOC22	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0,36	0,06
Sub jumlah		<b>0,55</b>	0,08
<b>PEKERJA ANAK (CHILD LABOR)</b>			
SOC23	Pendekatan manajemen untuk pekerja anak	0,09	0,04
SOC24	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0,09	0,04
Sub jumlah		<b>0,18</b>	0,08
<b>KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA (FORCED OF COMPULSORY LABOR)</b>			
SOC25	Pendekatan manajemen untuk kerja paksa atau wajib kerja	0,09	0,04
SOC26	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0,09	0,04
Sub jumlah		<b>0,18</b>	0,08
<b>PRAKTIK KEAMANAN (SECURITY PRACTICES)</b>			
SOC27	Pendekatan manajemen untuk praktik keamanan	0,00	0,06
SOC28	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0,18	0,18
Sub jumlah		0,18	<b>0,24</b>
<b>HAK-HAK MASYARAKAT ADAT (RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES)</b>			
SOC29	Pendekatan manajemen untuk hak-hak masyarakat adat	0,00	0,02
SOC30	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0,00	0,02
Sub jumlah		0,00	<b>0,04</b>
<b>PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS ASSESSMENT)</b>			
SOC31	Pendekatan manajemen untuk penilaian hak asasi manusia	0,00	0,06
SOC32	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0,09	0,02
SOC33	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0,00	0,00
SOC34	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0,00	0,00
Sub jumlah		<b>0,09</b>	0,08
<b>MASYARAKAT LOKAL (LOCAL COMMUNITIES)</b>			
SOC35	Pendekatan manajemen untuk masyarakat lokal	0,09	0,10

SOC36	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	0,09	0,44
SOC37	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0,00	0,10
Sub jumlah		0,18	<b>0,64</b>
<b>PENILAIAN SOSIAL PEMASOK (SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT)</b>			
SOC38	Pendekatan manajemen untuk penilaian hak asasi manusia	0,00	0,02
SOC39	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0,00	0,04
SOC40	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0,00	0,00
Sub jumlah		0,00	<b>0,06</b>
<b>KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)</b>			
SOC41	Pendekatan manajemen untuk kebijakan publik	0,00	0,08
SOC42	Kontribusi politik	0,00	0,28
Sub jumlah		0,00	<b>0,36</b>
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN (CUSTOMER HEALTH AND SAFETY)</b>			
SOC43	Pendekatan manajemen untuk kesehatan dan keselamatan pelanggan	0,09	0,04
SOC44	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0,09	0,00
SOC45	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0,00	0,00
Sub jumlah		<b>0,18</b>	0,04
<b>PEMASARAN DAN PELABELAN (MARKETING AND LABELING)</b>			
SOC46	Pendekatan manajemen untuk pemasaran dan pelabelan	0,18	0,12
SOC47	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0,27	0,12
SOC48	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0,00	0,02
SOC49	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0,00	0,12
Sub jumlah		<b>0,45</b>	0,38
<b>PRIVASI PELANGGAN (CUSTOMER PRIVACY)</b>			
SOC50	Pendekatan manajemen untuk privasi pelanggan	0,27	0,20
SOC51	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0,36	0,14
Sub Jumlah		<b>0,64</b>	0,34
<b>KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI (SOCIO ECONOMIC COMPLIANCE)</b>			
SOC52	Pendekatan manajemen untuk kepatuhan sosial ekonomi	0,00	0,18
SOC53	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0,00	0,10
Sub jumlah		0,00	<b>0,28</b>
Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Sosial (D)		<b>9,55</b>	7,90
Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Sosial (D : 53)		<b>0,18</b>	0,15
Jumlah nilai rata-rata seluruh standar atau indikator pengungkapan (E)		<b>45,64</b>	41,00

Jumlah nilai rata-rata ideal (seluruh standar atau indikator diungkapkan) (F)	155,00	155,00
Nilai indeks rata-rata Pengungkapan TJSL (E : F)	<b>0,294</b>	0264

Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

Tabel 3 menunjukkan nilai indeks rata-rata pengungkapan TJSL pada bank syariah adalah sebesar 0,294 atau 29,4% yang lebih tinggi dibandingkan nilai indeks rata-rata pada bank konvensional sebesar 0,264 atau 26,4%. Terlihat pula bahwa bank syariah memiliki keunggulan pengungkapan TJSL pada tiga dari empat standar pengungkapan yaitu standar pengungkapan umum, standar pengungkapan lingkungan, dan standar pengungkapan sosial. Pada standar pengungkapan umum, bank syariah memiliki nilai indeks rata-rata 0,51 dibandingkan bank konvensional 0,46. Pada standar pengungkapan lingkungan, bank syariah memiliki nilai indeks rata-rata 0,09 dibandingkan bank konvensional 0,08. Sedangkan pada standar pengungkapan sosial, bank syariah memiliki nilai indeks rata-rata 0,18 dibandingkan bank konvensional 0,015. Ini menunjukkan bahwa bank syariah memberikan perhatian yang besar pada standar pengungkapan umum terutama pada substandar profil organisasi substandar etika dan integritas, substandar keterlibatan pemangku kepentingan, dan substandar praktik pelaporan. Bank syariah juga memberikan perhatian pada standar pengungkapan lingkungan terutama pada substandar material, substandar keanekaragaman hayati, substandar emisi, substandar air limbah dan limbah, dan substandar penilaian lingkungan pemasok. Demikian juga halnya dengan standar pengungkapan sosial terutama pada substandar kepegawaian, substandar kesehatan dan keselamatan kerja, substandar pelatihan dan pendidikan, substandar keanekaragaman dan kesetaraan kesempatan, substandar kebebasan berseikat dan perundingan kolektif, substandar pekerja anak, substandar kerja paksa atau wajib kerja, substandar penilaian hak asasi manusia, substandar kesehatan dan keselamatan pelanggan, substandar

pemasaran dan pelabelan, serta substandar privasi pelanggan. Walaupun secara keseluruhan pengungkapan TJSL bank syariah lebih unggul, namun bank konvensional lebih unggul pada satu standar pengungkapan yaitu standar pengungkapan ekonomi. Pada standar ini, nilai indeks rata-rata bank konvensional adalah 0,30 dibandingkan bank syariah 0,27. Keunggulan ini berasal dari substandar keberadaan pasar, substandar dampak ekonomi tidak langsung, substandar praktik pengadaan, substandar anti korupsi, dan substandar perilaku anti persaingan.

#### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda berguna untuk menghasilkan suatu model untuk memprediksi nilai variabel dependen (Y) berdasarkan perubahan yang terjadi pada variabel independen (X). Analisis regresi menunjukkan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dibentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,264 + 2,367/10 \text{Kuadriliun} X_1 - 1,566 X_2 - 0,011 X_3 - 0,192 X_4 + 0,014 X_5 + \varepsilon$$

Dari model persamaan regresi yang dihasilkan, terlihat bahwa pengungkapan TJSL dapat diprediksi oleh lima variabel independen, dengan pengaruh yang bervariasi dalam bentuk penambahan maupun pengurangan. Namun, nilai konstanta sebesar 0,264 sudah cukup besar dan mendekati nilai rata-rata pengungkapan TJSL berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu sebesar 0,269907. Dapat dikatakan bahwa tidak terlalu banyak kontribusi dari variabel independen karakteristik perusahaan dan elemen tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan TJSL. Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pengungkapan TJSL akan diuraikan pada pengujian hipotesis.

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,264	0,087		3,032	0,004
Ukuran Perusahaan-Aset	2.367E-16	0,000	0,325	2,013	0,049
Profitabilitas-ROA	-1,566	2,222	-0,276	-0,705	0,484
Ukuran Dewan Direksi	-0,011	0,011	-0,178	-0,982	0,330
Direksi Independen	-0,192	0,124	-0,199	-1,544	0,129
Komite Audit	0,014	0,019	0,115	0,757	0,452

a. *Dependent Variable:* Pengungkapan TJSL

Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

### Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua asumsi klasik telah terpenuhi. Grafik normalitas menunjukkan semua data terdistribusi secara merata di sekitar garis linear yang berarti distribusi data adalah normal dan berarti data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Grafik heteroskedastisitas memperlihatkan data yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi sehingga model regresi layak dipergunakan untuk dasar prediksi. Hasil uji menunjukkan nilai VIF (*variance inflation factor*) yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabel independen yang berarti tidak ada multikolinearitas di antara variabel independen. Hasil uji menunjukkan nilai Durbin Watson adalah 1,250 yang berada di antara -2 sampai +2, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

### Pengujian Hipotesis Pertama (Uji Perbedaan)

Uji perbedaan dilakukan untuk mengetahui apakah perbedaan pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konvensional signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata pengungkapan TJSL antara kedua

jenis bank dengan menggunakan uji-z. Hasil analisis perbedaan nilai rata-rata disajikan pada Tabel 5 berikut. Tabel 5 memperlihatkan nilai rata-rata pengungkapan TJSL untuk bank syariah adalah 0,294436 yang berarti rata-rata bank syariah mengungkapkan 29,44% dari 155 indikator pengungkapan TJSL atau setara dengan 47 indikator.

Sedangkan nilai rata-rata pengungkapan TJSL untuk bank konvensional adalah 0,264510 yang berarti rata-rata bank konvensional mengungkapkan 26,45% dari 155 indikator pengungkapan TJSL atau setara dengan 41 indikator. Karena nilai rata-rata pada kedua jenis bank lebih besar daripada nilai standar deviasi maka berarti data variabel pengungkapan TJSL relatif sama atau tidak terlalu bervariasi.

Hasil ini sama dengan hasil perhitungan pengungkapan TJSL sebelumnya yang disajikan pada Tabel 5 yaitu sebesar 0,294 untuk bank syariah dan 0,264 untuk bank konvensional. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi perbedaan (pengujian hipotesis pertama) yang hasilnya ditunjukkan oleh Tabel 6.

Hipotesis pertama:

$H_{01}: \mu_{BS} = \mu_{BK}$  Tidak ada perbedaan pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a1}: \mu_{BS} \neq \mu_{BK}$  Ada perbedaan pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Perbedaan Nilai Rata-rata**

	Jenis Bank	N	Rata-rata	Standar Deviasi
Pengungkapan TJSJL	Bank Syariah	11	0,294436	0,0890697
	Bank Konvensional	50	0,264510	0,1500468

Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

Tabel 6 menunjukkan nilai  $t$  yang dihasilkan dalam uji- $z$  adalah sebesar 0,874 dengan signifikansi untuk uji 2 sisi sebesar  $0,390/2 = 0,195$ . Karena nilai signifikansi  $0,195 > 0,025$  (yaitu nilai *error* atau  $\alpha$  sebesar

0,05 dibagi 2), maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak.

Ini berarti tidak ada perbedaan pengungkapan TJSJL antara bank syariah dan bank konvensional.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-rata**

		<i>z-test for Equality of Means</i>		
		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Pengungkapan TJSJL	<i>Equal variances not assumed</i>	0,874	24,440	0,390

Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

### **Pengujian Hipotesis Kedua sampai dengan Hipotesis Keenam (Uji Signifikansi Pengaruh)**

Pengujian hipotesis kedua sampai dengan hipotesis keenam dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis regresi berganda yang telah disajikan pada Tabel 4.

Hipotesis kedua:

$H_{02}: \beta_1 = 0$  Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a2}: \beta_1 > 0$  Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank konvensional.

Untuk variabel karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan (aset), pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 0,050. Dengan demikian maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, yang berarti ukuran perusahaan (aset) berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank

konvensional. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari banyaknya aset, maka semakin banyak pula pengungkapan TJSJL yang dilakukan.

Hipotesis ketiga:

$H_{03}: \beta_2 = 0$  Karakteristik perusahaan berupa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a3}: \beta_2 > 0$  Karakteristik perusahaan berupa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank konvensional.

Untuk variabel karakteristik perusahaan berupa profitabilitas (ROA), pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,484 yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0,050. Dengan demikian maka  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, yang berarti profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSJL pada bank syariah dan bank konvensional. Hipotesis keempat:

$H_{04}: \beta_3 = 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a4}: \beta_3 > 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

Untuk variabel elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi, pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,330 yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0,050. Dengan demikian maka  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak, yang berarti ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

Hipotesis kelima:

$H_{05}: \beta_4 = 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a5}: \beta_4 > 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa direksi independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

Untuk variabel elemen tata kelola perusahaan berupa direksi independen, pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,129 yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0,050. Dengan demikian maka  $H_{05}$  diterima dan  $H_{a5}$  ditolak, yang berarti direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

Hipotesis keenam:

$H_{06}: \beta_5 = 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

$H_{a6}: \beta_5 > 0$  Elemen tata kelola perusahaan berupa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

Untuk variabel elemen tata kelola perusahaan berupa komite audit, pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,452 yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0,050. Dengan demikian maka  $H_{06}$  diterima dan  $H_{a6}$  ditolak, yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

### Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata bank syariah mengungkapkan 29,44% standar atau indikator TJSI, sedangkan rata-rata bank konvensional mengungkapkan 26,45%. Jadi, ada perbedaan sebesar 2,99%. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak signifikan. Walaupun secara statistik tidak signifikan, perbedaan secara deskriptif dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah benar-benar diterapkan pada bank syariah sehingga bank syariah pada umumnya melaksanakan aktivitas TJSI serta mengungkapkannya pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan. Hal ini patut diapresiasi mengingat umur bank syariah yang lebih muda dibandingkan bank konvensional, jumlah bank syariah yang lebih sedikit dibandingkan bank konvensional, dan ukuran bank syariah yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Jika dilihat secara rinci, bank syariah memberikan perhatian yang besar pada standar pengungkapan umum terutama pada substandar profil organisasi, substandar etika dan integritas, substandar keterlibatan pemangku kepentingan, serta substandar praktik pelaporan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islami yang menjunjung tinggi keterbukaan, menjaga etika dan integritas, memperhatikan relasi sosial (dengan *stakeholder*), serta menjalankan akuntabilitas dan transparansi (Rashid *et al.*, 2013). Bank syariah juga memberikan perhatian pada standar pengungkapan lingkungan terutama pada substandar material, substandar keanekaragaman hayati, substandar emisi, substandar air limbah dan

limbah, serta substandar penilaian lingkungan pemasok. Ini sangat sejalan dengan nilai dan prinsip syariah atau Islam yang mengatur bahwa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi (Aribi dan Gao, 2010). Demikian juga dengan standar pengungkapan sosial terutama pada substandar kepegawaian, substandar kesehatan dan keselamatan kerja, substandar pelatihan dan pendidikan, substandar keanekaragaman dan kesetaraan kesempatan, substandar kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, substandar pekerja anak, substandar kerja paksa atau wajib kerja, substandar penilaian hak asasi manusia, substandar kesehatan dan keselamatan pelanggan, substandar pemasaran dan pelabelan, serta substandar privasi pelanggan. Standar pengungkapan ini terkait erat dengan ajaran Islam untuk menjaga relasi sosial (Rashid *et al.*, 2013) dan menjalankan *fardhu kifayah* untuk bekerja menuju tujuan mulia seperti memerangi kemiskinan dan mengangkat orang yang kurang beruntung dan tertindas (Yusuf dan Bahari 2015).

Secara keseluruhan, adanya perbedaan secara deskriptif ini mengonfirmasi pernyataan Ilyas (2018) bahwa fondasi teoritis TJSL sangat mirip dengan doktrin Islam atau syariah tentang keadilan sosial dan akuntabilitas. Demikian juga dengan Aribi dan Gao (2010) bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, Dusuki dan Abdullah (2007) bahwa menerapkan nilai-nilai Islam atau syariah sudah dengan sendirinya menerapkan indikator-indikator dalam TJSL karena praktik TJSL konsisten dengan prinsip dan nilai syariah atau nilai Islami yang ditetapkan dalam Al Quran.

Dengan hasil pengujian statistik yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konvensional, maka hasil penelitian ini tidak mengonfirmasi Aribi dan Gao (2010) yang menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pengungkapan TJSL antara bank Islam atau syariah dan

bank konvensional. Demikian juga, hasil ini tidak sejalan dengan Yahya *et al.* (2004) serta Haniffa dan Hudaib (2007) yang menemukan tingkat pengungkapan aktivitas TJSL perusahaan berbasis syariah pada laporan tahunan cukup tinggi. Adanya perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh karena nilai-nilai Islam atau syariah yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia belum setinggi yang diterapkan pada bank Islam di Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan di negara-negara Timur Tengah di mana penelitian sebelumnya dilakukan.

Namun demikian, hasil penelitian ini sudah sejalan dengan Amran *et al.* (2017) yang menemukan bahwa pengungkapan TJSL oleh bank-bank Islam atau syariah umumnya tumbuh dengan baik di Malaysia dan Indonesia. Demikian juga dengan Scholtens (2009) yang menemukan bahwa pengungkapan TJSL pada sektor perbankan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, walaupun dalam penelitian ini pengungkapan tersebut belum cukup tinggi. Masih belum maksimalnya pengungkapan TJSL ini tidak hanya berlaku pada sektor perbankan (Ullah dan Rahman, 2015), namun juga pada sektor bisnis lainnya yang ditemukan belum mencapai 50% (Azim *et al.*, 2011; Retno M. dan Priantinah, 2012; Burhany, 2011).

Pengungkapan TJSL yang relatif masih rendah terutama ditemukan pada negara yang belum memiliki regulasi yang ketat mengenai aktivitas dan pengungkapan TJSL sehingga pelaksanaannya lebih berifat *voluntary* atau *semi voluntary*. Jika regulasi sudah ada dan mapan, maka kemungkinan besar nilai pengungkapan TJSL akan tinggi. Justifikasi hasil penelitian ini adalah, regulasi berupa POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik baru diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017, sehingga belum menampakkan hasil yang signifikan dalam implementasinya mengingat penelitian ini mengambil data tahun 2018.

Hasil analisis dan pengujian selanjutnya menemukan bahwa dari lima variabel yang diduga merupakan determinan pengungkapan TJSL, hanya satu yang terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL yaitu karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan. Sedangkan empat variabel lainnya yaitu karakteristik perusahaan berupa profitabilitas serta elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi, independen, dan komite audit, tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Dengan hasil ini maka dapat dijelaskan bahwa semakin besar ukuran bank yang dilihat dari aset yang dimiliki, maka semakin banyak pengungkapan TJSL yang dilakukannya. Ini mencerminkan bahwa aktivitas TJSL yang dilakukan juga banyak. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan atau semakin sedikit asetnya, maka semakin sedikit pula pengungkapan TJSL yang dilakukan, yang mencerminkan bahwa aktivitas TJSL yang dilakukan juga sedikit. Dengan besarnya aset yang dimiliki maka bank akan menyisihkan aset tersebut untuk melakukan aktivitas TJSL untuk kemudian mengungkapkannya. Besarnya aset mencerminkan kemampuan suatu bank sehingga tidak ragu untuk memberikan perhatian kepada TJSL. Ukuran perusahaan sebagai determinan pengungkapan TJSL yang ditemukan pada penelitian ini mengonfirmasi kembali Gray *et al.* (1995); Hackston dan Milne (1996); Tagesson *et al.* (2009); Giannarakis (2014); Habbash (2016), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan determinan positif atau berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL.

Hasil yang menemukan profitabilitas bukan determinan atau tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL, tidak mendukung Giannarakis (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan pengungkapan TJSL. Namun hasil ini mendukung Habbash (2016) yang menemukan profitabilitas perusahaan tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Sementara itu, variabel elemen tata kelola perusahaan yang ditemukan tidak satupun berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL, menunjukkan bahwa pada bank syariah dan bank konvensional yang diteliti, elemen yang terdiri atas ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit tersebut bukan determinan pengungkapan TJSL. Dengan kata lain, ukuran dewan direksi yang besar (jumlah direksinya banyak), direksi independen yang rasionya lebih tinggi (lebih banyak direksi independen pada dewan direksi), dan komite audit yang besar (jumlah komisioner pada komite audit lebih banyak) bukan merupakan jaminan bahwa bank akan melakukan dan mengungkapkan lebih banyak TJSL. Elemen-elemen tersebut tidak memiliki arti apa-apa jika aset perusahaan tidak memadai untuk melakukan aktivitas TJSL dan kemudian mengungkapkannya.

Hasil ini tidak sejalan dengan Esa dan Ghazali (2012) yang menemukan ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan luas pengungkapan TJSL serta Lone dan Khan (2016) yang menemukan ukuran dewan direksi dan direktur independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Demikian juga dengan Said *et al.* (2009) yang menemukan komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan TJSL. Namun hasil ini sejalan dengan Giannarakis (2014) yang menemukan ukuran dewan direksi tidak berhubungan dengan pengungkapan TJSL serta Habbash (2016) yang menemukan direksi independen dan komite audit tidak merupakan determinan atau tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.

Bagaimanapun, secara keseluruhan, hasil penelitian ini kembali membuktikan kebenaran *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan beberapa hal (termasuk pengungkapan TJSL) untuk memuaskan *stakeholder* karena membutuhkan dukungan untuk melanjutkan operasinya (Jensen dan Meckling, 1976;

Gray *et al.*, 1995; Donaldson, 1999). Demikian juga dengan *legitimacy theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat agar mereka tidak dikenakan biaya politik jika tindakannya tidak disukai oleh masyarakat (Deegan dan Rankin, 1996; Hooghiemstra, 2000). Dengan melakukan pengungkapan TJSI, perusahaan mencoba membentuk citra positif dan menunjukkan identitas bertanggung jawab secara sosial. Pengomunikasian aktivitas TJSI menjadi saluran untuk menciptakan, memulihkan atau mempertahankan legitimasi perusahaan termasuk pada sektor perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara statistik, tidak ada perbedaan pengungkapan TJSI antara bank syariah dan bank konvensional. Namun secara deskriptif, pengungkapan TJSI pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan pada bank konvensional; (2) Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan (aset) merupakan determinan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan konvensional; (3) Karakteristik perusahaan berupa profitabilitas (ROA) serta elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit bukan merupakan determinan yaitu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan konvensional.

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah: 1) Bank syariah dan bank konvensional perlu lebih meningkatkan lagi aktivitas TJSI yang diikuti dengan pengungkapan TJSI karena saat ini levelnya masih rendah; (2) Pemerintah melalui OJK perlu menindaklanjuti POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dengan melakukan pengawasan secara konsisten dan ketat beserta mekanisme *reward* dan

*punishment*-nya agar aktivitas dan pengungkapan TJSI berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat berkelanjutan yang ditargetkan; (3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan data tahun 2019 setelah POJK No. 51/POJK.03/2017 berjalan lebih lama serta mengeksplor variabel determinan lainnya yang mungkin akan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan TJSI pada bank syariah dan bank konvensional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. M. S., S. M. S. Hoque, dan M. Z. Hosen. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) of MNCs in Bangladesh: A Case Study on GrameenPhone Ltd. *Journal of Patuakhali Science and Technology University* 2(1): 51–61.
- Alimullah, M. M. 2006. Dynamics of Corporate Social Responsibility-Bangladesh Context. *Journal of AIUB Bangladesh* 3(1): 13–32.
- Amran, A., H. Fauzi, Y. Purwanto, F. Darus, H. Yusoff, M. M. Zain, D. M. A. Naim, dan M. Nejati. 2017. Social Responsibility Disclosure in Islamic Banks: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 15(1): 99–115.
- Aribi, Z. A. dan S. Gao. 2010. Corporate Social Responsibility Disclosure: A Comparison between Islamic and Conventional Financial Institutions. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 8(2): 72–91.
- Azim, M. I., E. Ahmed, dan B. D'Netto. 2011. Corporate Social Disclosure in Bangladesh: A Study of the Financial Sector. *International Review of Business Research Papers* 7(2): 37–55.
- Brammer, S. dan S. Pavelin. 2006. Voluntary Environmental Disclosures by Large UK Companies. *Journal of Business Finance and Accounting* 33(7–8): 1168–1188.
- Buhr, N. dan M. Freedman. 2001. Culture, Institutional Factors and Differences in

- Environmental Disclosure Between Canada and the United States. *Critical Perspectives on Accounting* 12(3): 293–322.
- Burhany, D. I. 2011. Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Indonesian Journal of Economics and Business* 1(2): 257–270.
- Cowen, S. S., L. B. Ferreri, dan L. D. Parker. 1987. The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency-Based Analysis. *Accounting, Organizations and Society* 12(2): 111–122.
- Deegan, C. dan B. Gordon. 1996. A Study of the Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations. *Accounting Business Research* (26): 187–199.
- Deegan, C. 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15(3): 282–311.
- Deegan, C. dan C. Blomquist. 2006. Stakeholder Influence on Corporate Reporting: An Exploration of the Interaction between WWF-Australia and the Australian Minerals Industry. *Accounting, Organizations and Society* 31(4–5): 343–372.
- Deegan, C. dan M. Rankin. 1996. Do Australian Companies Report Environmental News Objectively?: An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 9(2): 50–67.
- Donaldson, T. 1999. Response: Making Stakeholder Theory Whole. *The Academy of Management Review* 24(2): 237–241.
- Dusuki, A. W. dan N. I. Abdullah. 2007. Why Do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks? *International Journal of Bank Marketing* 25(3): 142–160.
- Elijido-Ten, E. 2007. Applying Stakeholder Theory to Analyze Corporate Environmental Performance: Evidence from Australian Listed Companies. *Asian Review of Accounting* 15(2): 164–184.
- Esa, E. dan N. A. M. Ghazali. 2012. Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Malaysian Government-Linked Companies. *Corporate Governance: The international journal of business in society* 12(3): 292–305.
- Farache, F. dan K. J. Perks. 2010. CSR Advertisements: A Legitimacy Tool? *Corporate Communications* 15(3): 235–248.
- Farook, S., M. K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2(2): 114–141.
- Friedman, A. L. dan S. Miles. 2001. Socially Responsible Investment and Corporate Social and Environmental Reporting in the UK: An Exploratory Study. *British Accounting Review* 33(4): 523–548.
- Gamerschlag, R., K. Möller, dan F. Verbeeten. 2011. Determinants of Voluntary CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany. *Review of Managerial Science* 5(2): 233–262.
- Giannarakis, G. 2014. Corporate Governance and Financial Characteristic Effects on the Extent of Corporate Social Responsibility Disclosure. *Social Responsibility Journal* 10(4): 569–590.
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. Corporate Social and Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 8(2): 47–77.
- GRI. 2015. G4 Sustainability Reporting Guidelines.
- Guthrie, J. dan I. Abeysekera. 2006. Content Analysis of Social, Environmental Reporting: What Is New? *Journal of Human Resource Costing & Accounting*

- 10(2): 114–126.
- Guthrie, J., S. Cuganesan, dan L. Ward. 2008. Industry Specific Social and Environmental Reporting: The Australian Food and Beverage Industry. *Accounting Forum* 32(1): 1–15.
- Habbash, M. 2016. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Social Responsibility Journal* 12: 740–754.
- Hackston, D. dan M. J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 9(1): 77–108.
- Haniffa, R. dan M. Hudaib. 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics* 76(1): 97–116.
- Hooghiemstra, R. 2000. Corporate Communication and Impression Management New Perspectives WHY Companies Engage in Corporate Social Reporting. *Journal of Business Ethics* 27(1): 55–68.
- Ilyas, M. 2018. Islamic Work Ethics and Corporate Social Responsibility in Business Organizations. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22: 1–6.
- Islam, A. M. dan C. Deegan. 2008. Motivations for an Organisation within a Developing Country to Report Social Responsibility Information: Evidence from Bangladesh. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 21(6): 850–874.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 19: 127–168.
- Khan, H. U. Z. 2010. The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR); Reporting: Empirical Evidence from Private Commercial Banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management* 52(2): 82–109.
- Kolk, A. 2003. Trends in Sustainability Reporting by the Fortune Global 250. *Business Strategy and the Environment* 12(5): 279–291.
- Kolk, A., S. Walhain, dan S. V. D. Wateringen. 2001. Environmental Reporting by the Fortune Global 250: Exploring the Influence of Nationality and Sector. *Business Strategy and the Environment* 10(1): 15–28.
- Lone, E. J. dan A. A. I. Khan. 2016. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Pakistan. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 16(45): 785–797.
- Moneva, J. M., dan F. Llana. 2000. Environmental Disclosures in the Annual Reports of Large Companies in Spain. *European Accounting Review* 9(1): 7–29.
- Patten, D. M. 2002. The Relation between Environmental Performance and Environmental Disclosure: A Research Note. *Accounting, Organizations and Society* 27(8): 763–773.
- Rashid, M., I. Abdeljawad, S. M. Ngali, dan M. K. Hassan. 2013. Customer-Centric Corporate Social Responsibility: A Framework for Islamic Banks on Ethical Efficiency. *Management Research Review* 36(4): 359–378.
- Retno M., R. D. dan D. Priantinah. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Jurnal Nominal* 1(1): 84–103.
- Said, R., Y. Zainuddin, dan H. Haron. 2009. The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal* 5(2): 212–226.
- Scholtens, B. 2009. Corporate Social Responsibility in the International Banking Industry. *Journal of Business Ethics* 86(2):

- 159-175.
- Shaumya, S. dan A. Arulrajah. 2017. The Impact of Green Banking Practices on Banks Environmental Performance: Evidence from Sri Lanka. *Journal of Finance and Bank Management* 5(1): 77-90.
- Tagesson, T., V. Blank, P. Broberg, dan S. O. Collin. 2009. What Explains the Extent and Content of Social Disclosures on Corporate Websites? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 16(March): 352-364.
- Ullah, M. H. dan M. A. Rahman. 2015. Corporate Social Responsibility Reporting Practices in Banking Companies in Bangladesh: Impact of Regulatory Change. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 13(2): 200-225.
- Vilar, V. H. dan J. Simão. 2015. CSR Disclosure on the Web: Major Themes in the Banking Sector. *International Journal of Social Economics* 42(3): 296-318.
- Waller, D. S. dan R. Lanis. 2009. Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure of Advertising Agencies: An Exploratory Analysis of Six Holding Companies Annual Reports. *Journal of Advertising* 38(1): 109-122.
- Yahya, M. A., A. A. Rahman, dan M. Tayib. 2004. The Relationship between Corporate Social Disclosure and Islamic Unit Trust Shareholdings. *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal* 9(1).
- Yusuf, M. Y. dan Z. B. Bahari. 2015. Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Towards Poverty Alleviation. In *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance* 4: 73-90.